

DERADIKALISASI *RETURNEE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) PEREMPUAN DAN PENGEMBANGANNYA PADA MASA MENDATANG DI INDONESIA

Oleh:

Itmaamul Wafaa Samudra,¹ Sri Wiyanti Eddyono²

INTISARI

Pasca tumbangya ISIS, perempuan dengan status kembali mencapai 21 orang yang kemudian diterapkan program deradikalisasi oleh BNPT bekerja sama dengan Sentra Handayani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi BNPT dalam melakukan deradikalisasi terhadap *returnee* ISIS perempuan, dan memberikan masukan pada masa mendatang pada program deradikalisasi memiliki dimensi gender pada masa mendatang bagi *returnee* ISIS di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek dengan alat pencarian data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari data sekunder berupa naskah dinas, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan seterusnya yang mendukung data primer.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa deradikalisasi dalam upaya membalikkan radikalisme teroris yang terjadi bukanlah pekerjaan yang mudah dan masih memiliki hambatan dalam implementasinya yaitu lemahnya pemahaman dimensi gender terlihat pada analisis ESTOM yang belum mendeteksi pada peranan perempuan dalam jaringan terorisme dan justru berpotensi adanya diskriminasi gender. perbedaan pemahaman tentang deradikalisasi dan refungsionalisasi yang mengakibatkan pada indikator-indikator yang belum mencapai pada level psikologis, lemahnya koordinasi antar lembaga dan OMS. Oleh Sebab itu, dimasa mendatang BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi lebih memperhatikan dimensi gender bahwa adanya jalur radikalisasi, faktor penarik dan pendorong, pemberdayaan perempuan, dan pembentukan peraturan BNPT dalam penanganan *returnee* ISIS perempuan dengan melakukan sinkronisasi infrastruktur kebijakan yang sensitif gender.

Kata kunci: Deradikalisasi, Analisis ESTOM, Dimensi Gender, *Returnee* ISIS Perempuan.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**DERADIKALISASI *RETURNEE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*
(ISIS) PEREMPUAN DAN PENGEMBANGANNYA PADA MASA
MENDATANG DI INDONESIA**

By:

Itmaamul Wafaa Samudra,¹ Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

After the fall of ISIS, women with return status reached 21 people who were then implemented by the BNPT deradicalization program in collaboration with Sentra Handayani. This study aims to analyze the obstacles faced by BNPT in deradicalizing female ISIS returnees, and provide future input on deradicalization programs that have a gender dimension in the future for ISIS returnees in Indonesia.

This study uses an empirical normative legal approach with primary data, namely data obtained directly from the subject with direct data search tools on the subject as information sought by secondary data in the form of official documents, books, research results in the form of reports, and so on that supports primary data.

This research concludes that deradicalization in an effort to reverse terrorist radicalism is not an easy job and still has obstacles in its implementation, namely the weak understanding of the gender dimension seen in the ESTOM analysis which has not detected the role of women in terrorist networks and instead has the potential for gender discrimination. differences in understanding of deradicalization and re-functionalization resulting in indicators that have not yet reached the psychological level, weak coordination between agencies and CSOs. Therefore, in the future the BNPT in implementing the deradicalization program will pay more attention to the gender dimension, that is, there are radicalization pathways, pull and push factors, women's empowerment, and the formation of BNPT regulations in handling female ISIS returnees by synchronizing gender-sensitive policy infrastructure.

Keywords: *Deradicalization, ESTOM Analysis, Gender Dimensions, Female ISIS Returnees.*

¹ Student of the Master of Law sStudy Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

² Lectur of Criminal Law Departement, Master od Law Program Study, Faculty of Law, Gadjah Mada University.